

ANALISIS PIDATO PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO DALAM PERSPEKTIF ANALISIS WACANA KRITIS

Iyah Parwati¹, Ika Septiana²

^{1,2}Universitas PGRI Semarang

Email: iyahparwati796@gmail.com¹, ikaseptiana@upgris.ac.id²

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam perspektif Analisis Wacana Kritis (AWK). Permasalahan utama yang dianalisis adalah bagaimana wacana politik dari pemimpin tertinggi negara berfungsi sebagai alat kekuasaan, membentuk persepsi publik, dan melegitimasi agenda pemerintah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap kalimat-kalimat yang merupakan isi dari pidato Presiden Prabowo dengan judul "Presiden Prabowo Buka-bukaan Depan Kapolri: Saya Tak Mau Basa-basi, Polisi Selalu Dijelek-jelekkan...". Data dikumpulkan melalui metode simak dan tulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidato tersebut adalah praktik pengelolaan kekuasaan yang kompleks dan multidimensional. Analisis tiga dimensi Fairclough menemukan: Dimensi Linguistik: Penggunaan metafora kuat (kekayaan sebagai "darah") dan gaya bahasa otoritatif untuk menekankan urgensi isu kebocoran kekayaan negara. Dimensi Praktik Diskursif: Menggabungkan genre resmi dengan dialog informal untuk menyampaikan pesan sensitif dan intertekstual dengan doktrin "polisi rakyat" Dimensi Praktik Sosial: Digunakan untuk menegaskan kekuasaan, merehabilitasi citra institusi kepolisian dengan mengalihkan kritik ke kesalahan individual, serta mereproduksi ideologi Nasionalisme Ekonomi dan Hukum dan Ketertiban (*Law and Order*). Pidato Presiden Prabowo secara strategis mengendalikan narasi negatif, menegaskan prioritas utama pemerintahannya (melawan kebocoran kekayaan negara), dan memperkuat legitimasi institusi keamanan.

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis; Kekuasaan; Ideologi; Pidato Politik; Prabowo Subianto.

Abstract: This study aims to describe President Prabowo Subianto's speech from a Critical Discourse Analysis (CDA) perspective. The main problem analyzed is how the political discourse of the country's highest leader functions as a tool of power, shaping public perception, and legitimizing the government's agenda. The method used is descriptive qualitative, with content analysis techniques on sentences that constitute the content of President Prabowo's speech entitled "President Prabowo Opens Up in Front of the National Police Chief: I Don't Want Small Talk, the Police Are Always Badmouthed...". Data were collected through listening and writing methods. The results of the study show that the speech is a complex and multidimensional practice of power management. Fairclough's three-dimensional analysis found: Linguistic Dimension: The use of strong metaphors (wealth as "blood") and authoritative language style to emphasize the urgency of the issue of state wealth leakage. Dimensions of Discursive Practice: Combining official genres with informal dialogue to convey sensitive and intertextual messages with the doctrine of "people's police". Dimensions of Social Practice: Used to assert power, rehabilitate the image of the police institution by diverting criticism to individual mistakes, and reproduce the ideology of Economic Nationalism and Law and Order. President Prabowo's speech strategically

controlled the negative narrative, emphasized his administration's top priority (fighting the leakage of state wealth), and strengthened the legitimacy of security institutions

Keywords: *Critical Discourse Analysis; Power; Ideology; Political Speech; Prabowo Subianto.*

PENDAHULUAN

Bahasa adalah suatu sistem, tanda, dan suara yang sifatnya sewenang-wenang yang dipakai oleh manusia untuk berinteraksi satu sama lain. Bahasa memiliki fungsi yang sangat krusial dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun dalam kebersamaan. Bahasa berfungsi sebagai media untuk menyelesaikan perselisihan, namun di sisi lain, bahasa juga bisa menjadi penyebab terjadinya konflik, karena selain menjadi sarana komunikasi, bahasa juga berperan sebagai cara untuk mengekspresikan diri. (Ferlien & Rumaf, 2020). Bahasa juga merupakan alat utama yang digunakan untuk berkomunikasi dalam hal menyampaikan pesan, kesan dan ide. Contohnya dalam hal berpidato.

Pidato dari pemimpin sebuah negara sering kali memiliki dampak yang signifikan bagi rakyatnya. Apa yang disampaikan oleh presiden mencerminkan visi yang ada dalam benaknya. Pidato tersebut juga menunjukkan wujud dari kepemimpinan mereka, terutama dalam aspek ekonomi dan politik. Pidato merupakan salah satu metode komunikasi dalam penyampaian informasi yang semakin mendapat perhatian baik di masa lalu maupun saat ini di Barat dan Timur berkat keunikan dari jenis percakapan lain serta pengaruh yang kuat terhadap pendengarnya (Fengjie et al., 2016)

Pidato yang disampaikan oleh Presiden adalah salah satu bentuk teks politik yang paling penting yang dihasilkan oleh sebuah negara. Sebagai simbol resmi dari kekuasaan eksekutif, pidato tersebut tidak hanya bertujuan menginformasikan atau menjelaskan kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membentuk persepsi publik, memberikan legitimasi terhadap tindakan pemerintah, dan menarik dukungan masyarakat. Dalam konteks ini, pidato presiden tidak hanya sekedar kumpulan kata-kata yang bersifat netral, melainkan merupakan arena di mana wacana berperan yang dipenuhi dengan ideologi dan kekuasaan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka analisis yang dapat mengungkap lapisan-lapisan tersembunyi dalam teks tersebut.

Wacana politik, terutama yang muncul dari pemimpin tertinggi, memiliki daya istimewa untuk membentuk persepsi, menentukan 'kebenaran' yang diterima umum, serta mempersembahkan kelompok tertentu sebagai 'kita' (in-group) atau 'mereka' (out-group).

Pidato seorang presiden, baik dalam konteks resmi seperti acara negara, pertemuan internasional, atau momen darurat, merupakan penggalan dari taktik komunikasi politik yang berusaha mengatur citra sosial dan penguasaan ideologi.

Menganalisis sebuah wacana adalah dengan cara, mengukur wacana dengan mempertimbangkan kebenaran atau ketidakbenaran menurut sintaksis dan semantik, sebagai suatu analisis, analisis wacana bertujuan untuk membongkar maksud-maksud dan makna makna tertentu (Eriyanto, 2001). Berbeda dengan analisis wacana, Analisis wacana kritis merupakan suatu upaya atau proses penguraian untuk mendapatkan penjelasan dari sebuah teks (realitas sosial) yang sedang dilakukan oleh seseorang yang sudah pasti mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang ia inginkan, Tidak hanya dilihat dari aspek kebahasaan saja, wacana kritis juga melihat bagaimana hubungan antara bahasa dengan konteks tertentu, Menurut (Darma, 2009), dalam mengkritik dan mengungkap hubungan antara bahasa, berita sosial dan politik, juga dapat menggunakan analisis wacana kritis .

Penelitian tentang analisis pidato pernah dilakukan oleh (Kurniawan et al., 2024) dengan judul penelitian “Analisis Modalitas dalam Pidato Menteri Pertahanan Prabowo Subianto “Forum Iiss Shangri La Dialogue 2024: Singgung Serangan Di Rafah”: Linguistik Fungsional Sistemik”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis teks melalui pendekatan LFS. Data dikumpulkan dari transkrip pidato yang tersedia secara public. Modalitas yang dianalisis mencakup kategori probabilitas, frekuensi, kemampuan, kewajiban, dan inklinasi. Analisis menunjukkan bahwa Prabowo menggunakan berbagai modalitas untuk menyampaikan kepatian, kekhawatiran, dan komitmen terhadap isu yang dibahas. Modalitas probabilitas sering digunakan untuk menyoroti ketidakpastian dan kompleksitas situasi di Rafah. Modalitas kewajiban digunakan untuk menegaskan komitmen Indonesia terhadap penyelesaian konflik dan kerjasama internasional. Penggunaan modalitas ini mencerminkan strategi retorik yang berusaha untuk mengimbangi antara menunjukkan keprihatinan mendalam dan menyerukan tindakan kolektif dalam komuitas internasional. Dengan cara ini, Prabowo berhasil menyampaikan pesan diplomatic yang kuat tanpa terlalu agresif atau defensive.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Maryanah, 2025) dengan judul penelitian “Analisis Pidato Presiden Prabowo: Jalan Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memiliki misi pencegahan dan penindakan korupsi yang cukup menjanjikan. Presiden Prabowo berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang

bersih dan terpercaya. Strategi yang dijanjikan adalah melaksanakan perbaikan sistem, penegakan hukum yang tegas, digitalisasi proses politik dan pemerintahan serta mewajibkan seluruh unsur pimpinan untuk memberi contoh dalam pemberantasan korupsi. Namun, korupsi di Indonesia telah demikian parah sehingga menghambat perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Artikel ini akan mengeksplorasi meskipun dengan komitmen Presiden pemberantasan korupsi memiliki peluang namun juga memiliki tantangan yang tinggi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pidato presiden prabowo subianto dalam perspektif analisis wacana kritis.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian analisis mendeskripsikan pidato presiden prabowo subianto dalam perspektif analisis wacana kritis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, Metode deskriptif adalah metode yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain (keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan), yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini wujud data berupa kalimat-kalimat tertulis yang merupakan isi dari pidato Prabowo Subianto, data digunakan untuk mengungkap objek penelitian berupa konteks wacana. dan Sumber data berasal dari pidato Presiden Prabowo dengan judul "Presiden Prabowo Buka-bukaan Depan Kapolri: Saya Tak Mau Basa-basi, Polisi Selalu Dijelek-jelekkan..." (Sumber: <http://www.youtube.com/watch?v=AM8flQSDz90>)

Pengumpulan data dilakukan dengan metode Simak dan tulis. Metode simak dilakukan dengan cara mencatat dengan cermat isi pidato Prabowo Subianto. Teknik selanjutnya, adalah teknik tulis yaitu untuk menjaring data dengan menulis hasil penyimakan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik isi (content analysis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Ditinjau dari sisi linguistik

a. Penggunaan Metafora (Lexicalization)

- (1) "Kebocoran Kekayaan Negara" (00:01:09) dan "Kekayaan itu ibarat darah" (00:01:28):

Metafora ini menyajikan kebocoran kekayaan sebagai masalah patologis (penyakit) yang mengancam eksistensi (kematian) bangsa. Ini adalah strategi retorik untuk menekankan urgensi

masalah korupsi, penyelundupan, dan kejahatan ekonomi sebagai ancaman terbesar, melebihi ancaman fisik.

b. Pilihan Kata dan Gaya Bahasa (Register)

(1) Ketegasan dan Kejujuran:

Presiden membangun identitas sebagai pemimpin yang tegas dan tidak basa-basi melalui frasa seperti: "Saya tak mau basa-basi" (00:06:09) dan penggunaan kata-kata informal yang kuat seperti "brengsek" (00:07:24), (00:09:21). Gaya bicara ini menciptakan jarak dengan wacana politik yang dianggap terlalu halus atau normatif, sehingga menarik perhatian dan kesan otentik di mata publik.

(2) Deiksis Personal yang Otoritatif: Penggunaan kata "saya" secara berulang saat menetapkan prioritas dan tanggung jawab.

"Saya letakkan di pundak Anda" (00:03:38): Secara eksplisit menegaskan otoritas Presiden dalam memberikan perintah langsung dan tanggung jawab kunci kepada Kapolri.

(3) Pengecualian (Titipan): Pengakuan tentang menitip beberapa mantan pengawal ("saya titip ini bintang baik" (00:04:54) secara sinis dibingkai sebagai hal yang "sah" dan "wajar." Ini adalah upaya preemptive untuk mengelola citra, memisahkan praktik "titipan" yang kecil (balas budi personal) dari praktik koruptif (nepotisme besar-besaran), bahkan dengan mengimplikasikan bahwa menteri dan jenderal lain juga melakukannya ("kalian juga nitip-nitip kan" (00:05:31))

2. Ditinjau dari Praktik Diskursif (Interpretasi)

a. Genre dan Intertekstualitas

1. Genre Gabungan: Pidato ini menggabungkan genre pidato resmi kenegaraan (penetapan kebijakan dan prioritas) dengan genre dialog terbuka/informal ("buka-bukaan"). Perpaduan ini memudahkan penyampaian pesan yang sensitif (kritik dan pembelaan polisi) kepada khalayak luas.
2. Intertekstualitas Wacana Keamanan: Wacana ini sangat intertekstual dengan doktrin keamanan rakyat. Penekanan pada: "Tentara harus jadi tentara rakyat polisi harus jadi polisi rakyat" (00:08:43). Ini adalah upaya ideologis untuk

mengembalikan citra aparat ke akar nasionalisme dan mendekatkan institusi keamanan dengan rakyat sebagai "mata dan telinga" (00:08:58).

b. Konteks Produksi dan Konsumsi

1. Pidato disampaikan di hadapan internal Polri, tetapi disiarkan secara publik.
2. Produksi: Tujuannya adalah memperkuat motivasi internal dan menetapkan fokus kerja (Narkoba, Penyelundupan, Judi Online) sekaligus memberikan pembelaan moral bagi institusi yang sering dikritik.
3. Konsumsi: Publik menerima pesan bahwa:
 - (1) Presiden fokus pada isu kebocoran kekayaan negara, (2) Presiden melindungi dan menghargai Polri, dan (3) Kritik terhadap polisi sering tidak adil.

3. Di tinjau dari praktik sosial (eksplanasi)

a. Pengelolaan Hubungan Kekuasaan (Power Management)

1. Pidato ini adalah praktik pengelolaan kekuasaan yang kompleks.
 - a) Penegasan Dominasi: Kekuasaan eksekutif tertinggi (Presiden) ditegaskan melalui penetapan prioritas mutlak kepada lembaga di bawahnya (Polri).
 - b) Rehabilitasi Citra: Presiden menggunakan kekuasaannya untuk merehabilitasi citra institusi Polri di mata publik. Ia menggeser fokus kritik dari *kesalahan sistemik* ke *kesalahan individual* yang kecil.
 - c) Strategi Ideologis: Ia membandingkan polisi yang salah dengan "muridnya ada yang tawuran, apa sekolahnya salah?" (00:07:38). Analogi ini berfungsi untuk de-institusionalisasi tanggung jawab kolektif, mempertahankan integritas institusi secara keseluruhan, dan menyalahkan *individu yang nakal*.

b. Reproduksi dan Penentangan Ideologi

1. Ideologi Nasionalisme Pembangunan: Pidato ini mereproduksi ideologi bahwa kedaulatan ekonomi adalah kunci keberhasilan bangsa, dan ancaman terhadap kedaulatan ini adalah kejahatan lintas batas (penyelundupan, kartel, dll.).
2. Penentangan Wacana Negatif terhadap Polri: Presiden secara eksplisit menentang wacana publik yang "polisi selalu dijelek-jelekkan selalu dimaki-maki" (00:06:12). Ia memberikan justifikasi ideologis bahwa polisi adalah pihak yang menegakkan

ketertiban sehingga wajar jika dibenci (misalnya, saat menilang di lampu merah). Ini adalah upaya untuk membenarkan posisi polisi dalam struktur sosial yang sering berkonflik.

3. Konstruksi "Liyan" (The Other): Terdapat upaya untuk mengkonstruksi pihak-pihak yang menyebabkan kegagalan bangsa (penyelundup, kartel narkoba, kartel judi online) sebagai musuh bersama dan ancaman yang nyata, sehingga mengalihkan perhatian dari potensi masalah internal birokrasi/institusi (selain masalah "titipan" yang sudah ia akui dan batasi).

Pembahasan

Dalam analisis wacana kritis (critical discourse analysis), teks bukanlah sesuatu yang bermakna nyata dan menjelaskan sesuatu secara apa adanya. Kebiasaan pribadi dan status sosial pembuat teks akan tergambar pada isi teks. Analisis wacana kritis bukan hanya membahas bahasa dalam suatu teks, melainkan juga menghubungkannya dengan konteks. Konteks di sini maksudnya adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu agar tujuan yang diinginkan tercapai. Adapun karakteristik penting dari analisis wacana kritis menurut Van Dijk yang dikutip (Fauzan, 2014) berupa tindakan, konteks, histori, kekuasaan, dan ideologi.

1. Tindakan

Tindakan utama dalam video pidato presiden yang berjudul "Presiden Prabowo Buka-bukaan Depan Kapolri: Saya Tak Mau Basa-basi, Polisi Selalu Dijelek-jelekkkan..." adalah memberikan pidato yang mengandung ada tindakan atau dasar yang diarahkan kepada institusi kepolisian dan kerajaan. Tindakan tersebut meliputi :

a. Penetapan Fokus Utama Kerjaan

Tindakan utama yang diambil oleh Presiden di awal pemerintahannya adalah menentukan prioritas masalah negara yang meliputi :

1. Identifikasi Masalah Utama: Tindakan awal yang dilakukan adalah berusaha "mengerti, mencari, memahami di mana kekayaan kita semuanya", kerana masalah utama yang dikenal pasti adalah kebocoran kekayaan negara.

2. Mengonsolidasikan Kekayaan: Tindakan ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan kekayaan negara agar dapat dikuasai dan dikelola, yang disifatkan sebagai "darah" bagi suatu bangsa.

b. Arahan Tugas Kepada Institusi Kepolisian

Presiden memberikan arahan tugas utama yang harus dipimpin oleh Kapolri, yang merupakan tindakan penetapan dasar dan keutamaan. Tiga Perintah Utama yaitu Presiden meletakkan tiga tanggungjawab utama di pundak Kapolri yaitu :Pemberantasan Narkoba, Penyelundupan, dan Judi *Online*. Selain itu presiden juga menyatakan tindakan beliau untuk memastikan integritas jawatan dengan menegaskan "saya tidak caw-cawe, saya tidak titip satuun pejabat" dalam urusan pelantikan, kecuali sedikit pengecualian bagi mantan pengawal yang loyal.

c. Tindakan Pembelaan dan Pembinaan Institusi

Presiden mengambil tindakan untuk membela dan memperkukuh institusi kepolisian di mata publik dan internal yang meliputi :

1. Pembelaan Terhadap Kritikan: Mengakui bahawa polisi "selalu dijelek-jelekkan" dan bertindak untuk menangkis naratif negatif, dengan menekankan bahawa tugas polisi memang sentiasa menertibkan.
2. Tindakan Disiplin: Menegaskan bahawa institusi, termasuk polisi dan tentera, "tidak ragu-ragu menindak anggotanya yang tidak tertib", membezakan kesalahan individu daripada kesalahan institusi secara keseluruhan.
3. Seruan Transformasi: Menggesa tindakan untuk mengubah minda dan peranan institusi, ia itu tentera dan polisi harus "jadi polisi rakyat", supaya rakyat dapat bertindak sebagai mata dan telinga dalam pencegahan jenayah (seperti narkotika dan penyelundupan di "pelabuhan tikus").

2. Konteks

Eriyanto (dalam Masitoh, 2020) menjelaskan bahwa konteks terbagi menjadi dua, yaitu: (1) berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnik, dan agama; (2) setting sosial tertentu, seperti tempat, waktu, posisi pembicara dan pendengar atau lingkungan fisik. Selanjutnya Van Dijk, Fairclough dan Wodak yang dikutip Fauzan (2014) mengatakan bahwa

analisis wacana kritis memasukan konteks dalam lingkup latar, situasi, historis, kekuasaan, dan ideologi. Konteks latar dan situasi dalam analisis wacana kritis dapat disamakan dengan konteks situasi, konteks latar belakang pengetahuan, latar belakang pengetahuan apa pun dalam analisis wacana pragmatis. Dengan demikian, para linguist dapat menjelaskan makna yang tersirat dari percakapan yang tersurat.

1) Konteks Situasional (Micro-Context)

Konteks ini berkaitan dengan siapa, kepada siapa, di mana, dan kapan wacana itu disampaikan. Aspek yang terlibat jika ditinjau dari deskripsi konteks wacana Pembicara yaitu Presiden Prabowo Subianto (pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi). Audiens Langsung: Kapolri, jenderal, menteri, dan anggota kepolisian dan Audiens Tidak Langsung: Rakyat Indonesia (melalui siaran TV/media). Berdasarkan dari referensi video tersebut disebutkan di hadapan Kapolri, jenderal-jenderal, dan menteri-menteri. Jika di tinjau dari aspek tujuan, tujuan wacana tersebut adalah menggaris bawahi prioritas utama pemerintahan baru, memberikan instruksi kepada kepolisian, dan membela citra institusi kepolisian di mata publik dan anggotanya sendiri. Dalam video tersebut disebutkan permintaan 3 hal kepada Kapolri: Pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan judi *online*. Sedangkan pada aspek waktu atau keadaan disampaikan di awal pemerintahan beliau, menandakan adanya agenda dan fokus kebijakan yang baru. Pada video tersebut disampaikan kalimat "di awal pemerintahan saya...".

2) Konteks Sosiopolitik (Meso-Context)

Konteks ini melibatkan struktur sosial, politik, dan sejarah yang melingkupi produksi wacana.

- a. Isu Krisis Kepercayaan Institusi: Wacana muncul dalam konteks di mana citra Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sering kali menjadi sorotan negatif di mata publik. Presiden secara eksplisit mengakui hal ini. "polisi selalu dijelek-jelekin selalu dimaki-maki..."
- b. Transisi Pemerintahan dan Penetapan Prioritas: Pidato ini berfungsi untuk mengarahkan fokus aparaturnya negara, khususnya penegak hukum, pada isu-isu yang dianggap krusial oleh administrasi baru. Prioritas yang ditetapkan (kebocoran kekayaan negara) menjadi kerangka kerja bagi seluruh kebijakan.

- c. Wacana Korupsi dan *Shadow Economy*: Penekanan pada penyelundupan, narkoba, dan judi *online* mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi gelap (yang berpotensi menjadi sumber kebocoran kekayaan) dipandang sebagai ancaman utama terhadap stabilitas dan kekayaan nasional.

3. Konteks Ideologis dan Kekuasaan (Macro-Context)

Konteks ini berkaitan dengan sistem keyakinan, nilai, dan hubungan kekuasaan yang direproduksi atau ditantang oleh wacana.

- a. Ideologi Nasionalis-Konservatif: Wacana ini sangat menekankan konsep kekayaan negara sebagai "darah" yang harus dijaga agar "badan" bangsa tidak mati. Hal ini mereproduksi ideologi negara yang berfokus pada kedaulatan ekonomi dan perlindungan aset nasional.
- b. Struktur Kekuasaan dan Legitimasi: Sebagai Presiden, Prabowo menggunakan posisinya untuk melegitimasi (mempertahankan dan membenarkan) tindakan dan peran institusi kepolisian, meskipun mengakui adanya kelemahan. Pidato ini bertindak sebagai intervensi kekuasaan untuk mengendalikan narasi publik tentang polisi, membedakan antara oknum yang "nakal" dan institusi secara keseluruhan yang tetap "kerja benar".
- c. Pembedaan *In-Group* dan *Out-Group*: Presiden mengategorikan dirinya ("saya ini orang yang selalu enggak mau basa-basi") dan Polri ("kerja benar") sebagai *In-Group* (pihak yang bekerja keras dan jujur), sementara mengategorikan pihak yang mengkritik polisi sebagai *Out-Group* (pihak yang salah karena "kita salah kita dongkol").

3 Historis

Konteks historis dalam video tersebut merujuk pada latar belakang dan peristiwa masa lalu yang relevan, baik yang disebutkan secara eksplisit oleh Presiden Prabowo Subianto maupun yang membentuk konteks pidato tersebut. Historis yang tersirat dalam pidato presiden tersebut adalah :

▪ Histori Kebocoran Kekayaan Negara

Presiden menempatkan isu kebocoran kekayaan negara sebagai masalah historis dan berkelanjutan yang harus diselesaikan segera seperti isu berkepanjangan. Dalam

pidatonya Beliau menyiratkan bahwa kebocoran kekayaan negara adalah masalah yang telah terjadi "terus-menerus tahun-tahun tahun bertahun-tahun berdekade dekade". Selain itu prioritas pemerintahan Berdasarkan sejarah kebocoran ini, tindakan historis pertamanya sebagai Presiden adalah menentukan bahwa masalah utama yang harus diselesaikan adalah kebocoran kekayaan negara. Hal ini memposisikan pemerintahannya sebagai masa untuk mengakhiri siklus historis kerugian ini.

▪ **Histori Citra Institusi Kepolisian**

Presiden Prabowo juga menyinggung tentang histori hubungan antara polisi dan Masyarakat seperti citra negatif berulang. Beliau menyebutkan bahwa polisi "selalu dijelek-jelekkan, selalu dimaki-maki". Ini merujuk pada sejarah panjang ketegangan dan kritik publik terhadap institusi penegak hukum di Indonesia. Asal-usul Kritik yang menunjukkan Prabowo memberikan konteks historis mengenai asal-usul kritik tersebut, yaitu karena tugas polisi adalah menertibkan, yang secara alami menimbulkan ketidaknyamanan bagi yang melanggar (misalnya, di lampu merah). Selanjutnya yaitu pengalaman pribadi. Secara pribadi, beliau menyebutkan historis pengalaman masa mudanya sendiri saat berhadapan dengan polisi lalu lintas ("saya juga waktu muda dulu enggak sekarang kalau lampu merah ada polisi enggak jengkel"), yang berfungsi untuk membangun empati namun juga menunjukkan bahwa ketidakpatuhan adalah akar dari kritik masa lalu.

▪ **Histori Militer/Kepemimpinan**

Presiden Prabowo juga menggunakan latar belakang historisnya sebagai perwira militer untuk memperkuat argumentasinya. Beliau merujuk pada pengalaman masa lalunya sebagai Panglima "Saya mantan panglima" untuk menunjukkan bahwa beliau memahami dinamika internal dan permasalahan adanya "anak buah yang nakal" dalam institusi bersenjata.

4. Kekuasaan

1. Kekuasaan Formal (Otoritas)

Kekuasaan ini bersumber dari kedudukan formal sebagai Presiden dan pemimpin negara. Kekuasaan ini meliputi :

- 1) Pemberi Perintah dan Penentu Prioritas: Presiden menggunakan kekuasaannya untuk mendefinisikan dan menetapkan agenda utama negara. Tindakannya untuk

mengidentifikasi "kebocoran kekayaan negara" sebagai masalah utama adalah tindakan kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah kebijakan nasional.

- 2) Pengendali Institusi: Beliau secara langsung menggunakan kekuasaannya untuk memberikan arahan spesifik kepada Kapolri (pucuk pimpinan kepolisian) dengan meletakkan tiga tugas prioritas di pundaknya: pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan judi *online*. Ini adalah penegasan kekuasaan eksekutif atas lembaga penegak hukum.
- 3) Kekuasaan Pengangkatan/Penempatan: Meskipun menyatakan "tidak caw-cawe," Presiden mengakui penggunaan kekuasaannya untuk "menitip" perwira yang merupakan mantan pengawalnya, menunjukkan adanya diskresi kekuasaan untuk membalas loyalitas.

2 Kekuasaan Wacana (Hegemoni)

Kekuasaan ini diekspresikan melalui kemampuan untuk membentuk dan mengendalikan narasi (wacana) publik yaitu : membingkai krisis presiden menggunakan metafora kekuasaan untuk menjelaskan masalah, seperti mengibaratkan kekayaan negara sebagai "darah" agar mudah dipahami. dengan membingkai kebocoran sebagai ancaman vital, ia membenarkan fokus kekuasaannya pada isu tersebut, mengendalikan kritik publik: kekuasaan wacana digunakan untuk mempertahankan dan melegitimasi institusi kepolisian dari kritik. Dengan mengakui bahwa polisi "selalu dijelek-jelekkan", beliau mereduksi kritik menjadi reaksi alami masyarakat yang "salah" (misalnya, saat melanggar lampu merah), alih-alih kritik terhadap masalah struktural di institusi tersebut dan memproduksi solidaritas: kekuasaan digunakan untuk menyerukan ideologi "polisi rakyat", sebuah upaya untuk menyelaraskan aparatur negara dengan masyarakat, sehingga kekuasaan penegakan hukum mendapat legitimasi dan bantuan dari rakyat ("mata dan telinga").

3. Kekuasaan Simbolik (Pembinaan Citra Diri)

Kekuasaan ini muncul dari upaya membangun citra diri yang bersih dan kredibel seperti Penegasan Integritas: Presiden secara eksplisit menggunakan pidato ini untuk menegaskan dirinya sebagai pemimpin yang bersih dari kepentingan pribadi, seperti penegasan "saya tidak titip benar Kapolri". Pernyataan ini bertujuan untuk menegaskan otoritas moral dan membedakan kekuasaannya dari praktik titip-menitip yang mungkin terjadi di masa lalu dan

kekuasaan naratif personal: beliau menggunakan referensi pribadi (pengalaman sebagai mantan panglima dan pengalaman menghadapi polisi) untuk membangun citra diri sebagai seseorang yang memahami masalah dari dalam dan memiliki pengalaman historis untuk memimpin institusi.

5. Ideologi

Video pidato ini mengandung beberapa dimensi ideologi utama yang membentuk dasar pandangan Presiden Prabowo Subianto terhadap tata kelola negara, keamanan, dan hubungan antara pemerintah dengan rakyat. ideologi-ideologi utama yang tersurat dan tersirat dalam wacana ini adalah :

▪ Ideologi Nasionalisme Ekonomi (Statism)

Ideologi ini adalah yang paling sentral dalam pidato, yang menegaskan pentingnya kedaulatan negara atas sumber daya dan ekonomi.

- a. Pusat Kekuasaan Negara: Keyakinan bahwa masalah utama bangsa adalah "kebocoran kekayaan negara". Kekayaan dianalogikan sebagai "darah" bagi badan negara.
- b. Prioritas Kontrol: Negara harus "menguasai" dan "mengelola" kekayaan tersebut. Ideologi ini menempatkan kontrol negara yang kuat atas sumber daya sebagai prasyarat mutlak bagi keberhasilan dan kelangsungan hidup bangsa.

▪ Ideologi Hukum dan Ketertiban (*Law and Order*)

Ideologi ini menekankan peran negara dalam menegakkan ketertiban sosial secara tegas, terutama melalui aparat keamanan. Fokus pada Ancaman Keamanan: Selain kebocoran ekonomi, Presiden mengidentifikasi ancaman keamanan spesifik yang harus ditangani oleh polisi, yaitu narkoba, penyelundupan, dan judi *online*. Ini mencerminkan pandangan bahwa penegakan hukum yang tegas adalah kunci stabilitas. Pembelaan Institusi: Ideologi ini tercermin dalam pembelaan terhadap institusi Polri yang "selalu dijelek-jelekkan". Dalam pandangan *Law and Order*, kritik publik harus dikelola, dan kesalahan individu tidak boleh merusak fungsi utama lembaga penegak hukum yang vital.

▪ **Ideologi Profesionalisme dan Integritas Birokrasi**

Ideologi tersebut adalah ideologi yang berupaya menampilkan pemerintahan yang bersih, kompeten, dan bebas dari kepentingan pribadi. Anti-Kroniisme/Anti-Korupsi: Pernyataan bahwa "saya tidak caw-cawe, saya tidak titip satuun pejabat" adalah upaya untuk menegaskan ideologi tata kelola yang profesional, yang bebas dari intervensi politik pribadi (meskipun ada pengakuan kecil tentang "nitip" mantan pengawal). Penekanan Kinerja: Fokus pada Kapolri untuk "kerja benar" dalam menangani tiga tugas utama menunjukkan ideologi yang menuntut kinerja berbasis hasil dan kepatuhan pada tugas pokok.

▪ **Ideologi Kemiliteran Sipil (*Manunggal dengan Rakyat*)**

Ideologi ini bertujuan untuk mendekatkan aparat keamanan dengan masyarakat untuk menciptakan sinergi dalam menjaga kedaulatan dan keamanan. Polisi Rakyat: Seruan agar tentara dan polisi harus "jadi polisi rakyat" adalah ideologi yang berakar pada konsep tradisional Indonesia tentang persatuan antara aparat keamanan dan masyarakat. Keterlibatan Masyarakat: Ideologi ini memandang rakyat sebagai mitra dalam keamanan, di mana rakyat harus menjadi "mata dan telinga" untuk melaporkan ancaman seperti penyelundupan. Ini adalah upaya untuk mendemokratisasi pengawasan keamanan di tingkat akar rumput.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Analisis wacana kritis (AWK) terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto yang berjudul "Presiden Prabowo Buka-bukaan Depan Kapolri: Saya Tak Mau Basa-basi, Polisi Selalu Dijelek-jelekkan..." menunjukkan bahwa pidato tersebut adalah praktik pengelolaan kekuasaan yang kompleks dan multidimensional, berfungsi sebagai alat untuk membentuk persepsi publik dan memberikan legitimasi terhadap agenda pemerintah. Dalam pidato tersebut terdapat beberapa dimensi yaitu :

1. dimensi linguistic dan retorika seperti : penggunaan metafora, gaya Bahasa otoratif dan pengelolaan citra diri.
2. Dimensi praktik Diskursif (Konteks) : Genre gabungan, dan tujuan ganda
3. Dimensi Praktik Sosial (Kekuasaan dan Ideologi) : Penegasan kekuasaan, rehabilitasi citra institusi, dan reproduksi ideologi utama

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.

- Darma, Y. A. (2009). *Analisis Wacana Kritis*. Yrama Widya.
- Eriyanto. (2001). *Analisis wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Lkis. Fauzan, U. (2014). Analisis Wacana Kritis dari Model Fairclough hingga Mills. *Jurnal Pendidikan*, 6(1), 1–15.
- Fengjie, L., Jia, R., & Yingying, Z. (2016). Analysis of the Rhetorical Devices in Obama’s Public Speeches. *International Journal of Language and Linguistics*, 4(4).
- Ferlien, Y., & Rumaf, N. (2020). Analisis Pidato Prabowo Subianto Dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Frasa: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 1(2).
- Kurniawan, B., Mahendra, Y. A., Rofiki, K., Hidayah, S. N., & Firnanda, L. (2024). Analisis Modalitas Dalam Pidato Menteri Pertahanan Prabowo Subianto “Forum Iiss Shangri La Dialogue 2024: Singgung Serangan di Rafah”: Linguistik Fungsional Sistemik. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6), 1–9.
- Maryanah, T. (2025). Analisis Pidato Presiden Prabowo: Jalan Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 85–98.